

RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN 2025



Jalan Belimbing Raya No. 2 Sungai Pinang 70675



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 251 /KUM/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;
- c. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan; dan
- d. Bab IV Penutup.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Banjar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

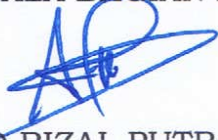
Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar 2025 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025 triwulan I dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi beserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan I tahun 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Sungai Pinang dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.



Martapura, 20 Juni 2025
KAMAT SUNGAI PINANG

MARWATA, SE
Pembina, IV/a

NIP. 19690217 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I	12
2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I	13
2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I	15
2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan	15
2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan	15
2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah 15	15
2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1. Perubahan Indikator Kinerja	21
3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan	21
3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	21
3.4. Alasan dilakukan perubahan	21
BAB IV PENUTUP	26
4.1. Catatan Penting	26
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	26
4.3. Rencana Tindak Lanjut	27
LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 hingga Triwulan I dan Capaian Renstra SKPD	7
Tabel 2.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 s.d Triwulan I	17
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025	23
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan/penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/285/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29);
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor ...);
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Sungai Pinang tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagai unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp2.787.546.288,00 (Dua miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Sungai Pinang tetap melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp2.956.428.160,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Sungai Pinang hingga triwulan I secara lengkap, tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 hingga Triwulan I dan Capaian Renstra SKPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)				
7		Urusan : Unsur Wilayah														
7	1	Bidang Urusan : Kecamatan														
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78	74	76	77,32	101,74%	NA	NA	NA				
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	16,67%	33,33%	199,94%			
7	1	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	12	6	6	100,00%	0	0	100,00	18	60,00%
7	1	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	2	1	1	100,00%	NA	NA	NA	3	60,00%
7	1	1	2.02	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	2	1	1	100,00%	NA	NA	NA	3	60,00%
7	1	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	2	1	1	100,00%	NA	NA	NA	3	60,00%
7	1	1	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	2	1	1	100,00%	NA	NA	NA	3	60,00%
7	1	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	4	4	4	100,00%	0	0	100,00	8	50,00%
7	1	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	2	2	2	100,00%	1	1	100,00	5	62,50%
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	66,67%	88,89%		
7	1	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	28	14	14	100,00%	18	18	100,00	60	85,71%
7	1	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	24	12	12	100,00%	3	3	100,00	39	65,00%

7	1	1	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	1	1	1	100,00%	1	0	0,00	2	50,00%
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	62,50%	50,00%	80,00%		
7	1	1	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	2	1	1	100,00%	1	0	0,00	3	60,00%
7	1	1	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	8	4	4	100,00%	1	1	100,00	13	65,00%
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%	0,00%	0,00%		
7	1	1	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	2	2	2	100,00%	0	0	100,00	4	50,00%
7	1	1	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	1	1	1	100,00%	1	0	0,00	2	33,33%
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	74,17%	16,67%	22,48%		
7	1	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	10	5	5	100,00%	1	0	0,00	15	60,00%
7	1	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	2	1	1	100,00%	1	0	0,00	3	75,00%
7	1	1	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50	20	10	10	100,00%	1	0	0,00	30	60,00%
7	1	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	125	50	25	25	100,00%	1	0	0,00	75	60,00%
7	1	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15	6	3	3	100,00%	2	0	0,00	9	60,00%
7	1	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	12	12	12	100,00%	3	3	100,00	27	56,25%
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%	33,34%	133,36%		
7	1	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	100,00	0	0,00%
7	1	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	6	2	2	100,00%	3	2	66,67	10	83,33%
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	33,33%	44,44%		
7	1	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	1	1	1	100,00%	1	0	0,00	2	50,00%
7	1	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	24	12	12	100,00%	3	3	100,00	39	65,00%

7	1	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	2	1	1	100,00%	1	0	0,00	3	60,00%
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	44,44%	88,88%		
7	1	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	NA	12	12	100,00%	9	9	100,00	21	58,33%
7	1	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	1	1	1	100,00%	9	3	33,33	5	166,67%
7	1	1	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	NA	1	1	100,00%	0	0	100,00	1	50,00%
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	62,50%	50,00%	80,00%		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%	100,00%	400,00%		
7	1	2	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	4	2	2	100,00%	1	1	100,00	7	70,00%
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
7	1	2	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29	8	7	7	100,00%	1	0	0,00	15	51,72%
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100,00%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	50,00%	66,67%		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	50,00%	66,67%		
7	1	3	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	38	5	11	11	100,00%	21	21	100,00	37	97,37%
7	1	3	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	4	2	2	100,00%	1	0	0,00	6	60,00%
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	25,00%	12,50%	50,00%		
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	25,00%	50,00%		

7	1	4	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11	2	3	3	100,00%	2	1	50,00	6	54,55%
7	1	4	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	4	2	2	100,00%	0	0	100,00	6	60,00%
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
7	1	4	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8	3	1	0	0,00%	0	0	100,00	3	37,50%
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%		
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%		
7	1	5	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	160	40	40	40	100,00%	0	0	100,00	80	50,00%
7	1	5	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	50,00%
7	1	5	2.01	0007	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10	4	2	2	100,00%	1	0	0,00	6	60,00%
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%		

7	1	6	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3	NA	1	1	100,00%	1	0	0,00	1	33,33%
7	1	6	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	2	1	1	100,00%	0	0	100,00	3	60,00%
7	1	6	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	2	1	1	100,00%	0	0	100,00	3	60,00%
7	1	6	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0,00	0	0,00%
7	1	6	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	2	1	1	100,00%	0	0	100,00	3	60,00%
7	1	6	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5	2	1	1	100,00%	NA	NA	0,00	3	60,00%

Sumber data: Inputan Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 hingga Triwulan I dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Sub kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa Pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I tercatat TIDAK ADA.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Sungai Pinang sampai dengan Triwulan I ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025:

- Beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang penempatan rencana pelaksanaannya pada triwulan II, III dan IV.

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.
- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukam, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Sungai Pinang

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat;
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target;
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan;
- d. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 s.d Triwulan I

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	78	Nilai	2.620.513.060,00	NA	886.391.588	NA	740.331.559
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	Persentase	8.207.000,00	21,63	1.775.000	0	0
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	1.107.000,00	0	0	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	5.000.000,00	25	1.250.000	0	0
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2.100.000,00	25	525.000	0	0
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persentase	1.640.760.000,00	23,31	418.497.967	20,82	342.649.332
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Orang/bulan	1.594.600.000,00	23,5	405.307.967	20,69	329.859.332
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	45.360.000,00	15,3	12.390.000	25	12.390.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	800.000,00	100	800.000	50	400.000
10	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	Persentase	8.600.000,00	16,85	3.087.500	11,99	1.500.000
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	350.000,00	25	87.500	0	0
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	8.250.000,00	16,5	3.000.000	12,5	1.500.000
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persentase	20.770.000,00	42,37	5.000.000	0	0
14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	770.000,00	0	0	0	0
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	20.000.000,00	44	5.000.000	0	0
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persentase	114.201.800,00	34,25	18.924.500	9,4	6.093.750
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	739.500,00	100	739.500	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1.305.000,00	60,31	787.000	60,31	787.000
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.908.000,00	53,14	1.860.000	53,14	1.860.000
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.760.300,00	34,06	940.200	48,07	1.326.750
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	Laporan	5.489.000,00	20	1.097.800	0	0
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	92.000.000,00	31,76	13.500.000	2,49	2.120.000
23	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100	Persentase	419.109.000,00	87,32	347.953.000	73,71	316.646.000
24	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	19.464.000,00	0	0	0	0
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	399.645.000,00	91,57	347.953.000	77,3	316.646.000
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persentase	223.671.260,00	27,42	61.319.621	23,08	51.612.477
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1.750.000,00	28,57	500.000	0	0
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	52.786.260,00	25	13.196.565	6,65	3.512.480
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	169.135.000,00	28,16	47.623.056	28,44	48.099.997
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persentase	185.194.000,00	22,42	29.834.000	17,45	21.830.000
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	131.520.000,00	24,49	20.520.000	22	18.440.000
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	Unit	19.930.000,00	46,73	9.314.000	17,01	3.390.000
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	33.744.000,00	0	0	0	0
34	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	persentase	31.248.800,00	21,4	8.179.850	15,21	6.460.000
35	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	8.902.800,00	13,11	2.660.850	14,97	3.040.000
36	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	8.902.800,00	13,11	2.660.850	14,97	3.040.000
37	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persentase	22.346.000,00	24,7	5.519.000	15,3	3.420.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	22.346.000,00	24,7	5.519.000	15,3	3.420.000
39	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persentase	85.569.000,00	37,39	21.410.167	38,6	19.252.000
40	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persentase	85.569.000,00	37,39	21.410.167	38,6	19.252.000
41	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21	Lembaga Kemasyarakatan	18.932.000,00	79,25	7.932.000	98,07	7.779.000
42	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	66.637.000,00	25,5	13.478.167	21,7	11.473.000
43	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100	Persentase	24.957.000,00	46,22	11.535.500	36,97	9.227.000
44	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persentase	20.196.500,00	57,12	11.535.500	45,69	9.227.000
45	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	11.535.500,00	100	11.535.500	79,99	9.227.000
46	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	8.661.000,00	0	0	0	0
47	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persentase	4.760.500,00	0	0	0	0
48	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	4.760.500,00	0	0	0	0
49	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	persen	158.469.900,00	13,4	20.094.900	12,04	18.062.000
50	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persentase	158.469.900,00	13,4	20.094.900	12,04	18.062.000
51	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	40	Orang	58.064.000,00	0	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
52	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	Dokumen	100.405.900,00	21,15	20.094.900	19,01	18.062.000
53	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	100	persen	27.720.400,00	26,79	7.427.000	17,99	4.986.000
54	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persentase	27.720.400,00	26,79	7.427.000	17,99	4.986.000
55	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Dokumen	1.991.000,00	100	1.991.000	9,94	198.000
56	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	1.847.700,00	0	0	0	0
57	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	2.308.000,00	0	0	0	0
58	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	19.800.000,00	27,45	5.436.000	24,18	4.788.000
59	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	1.773.700,00	0	0	0	0

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat perubahan untuk target indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan karena adanya Perubahan pada Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025-2029 menyesuaikan dengan kondisi kinerja yang telah terlaksana sesuai dengan capaian kinerja periode sebelumnya diataranya perubahan pada indikator kinerja sasaran Camat, Perubahan indikator program dan kegiatan. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 6 Program 15 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp2.956.428.160,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena hasil penyesuaian kebutuhan riil gaji dan tunjangan ASN;
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan karena Efisiensi;
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor karena kebutuhan pengadaan alat tulis kantor yang belum terakomodasi sebelumnya;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD karena Efisiensi;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel karena penyesuaian kebutuhan dari pengadaan meja rapat menjadi kursi rapat

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya karena pengadaan mobil camat untuk mendukung operasional pelayanan;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan karena pemeliharaan kendaraan dinas camat dan sekcab;
8. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan karena dialihkan ke aktivitas lain;
9. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa karena untuk kegiatan monitoring dan evaluasi APBDes;
10. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan karena untuk mendukung kegiatan PKK di wilayah kecamatan;
11. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal karena untuk pelaksanaan kegiatan MTQ.

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu		Alasan Perubahan/ Keterangan	
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025		Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	87	309.192.100,00	327.965.100,00	18.773.000	
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Nilai Evaluasi Kecamatan		97				
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	58,65	2.478.354.188,00	2.628.463.060,00	150.108.872	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	78	78 Indeks	2.478.354.188,00	2.628.463.060,00	150.108.872	Penambahan Anggaran
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100%	100%	8.207.000,00	8.207.000,00	0	Tetap
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	1.107.000,00	1.107.000,00	0	Tetap
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0	Tetap
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2.100.000,00	2.100.000,00	0	Tetap
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100%	100%	1.861.576.128,00	1.644.960.000,00	-216.616.128	Pengurangan Anggaran
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.811.216.128,00	1.594.600.000,00	-216.616.128	Penyesuaian kebutuhan riil gaji dan tunjangan ASN
11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	49.560.000,00	49.560.000,00	0	Tetap
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	800.000,00	800.000,00	0	Tetap
13	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100%	100%	12.350.000,00	12.350.000,00	0	Tetap
14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	350.000,00	350.000,00	0	Tetap
15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0	Tetap
16	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100%	100%	25.770.000,00	25.770.000,00	0	Pengurangan Anggaran
17	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	770.000,00	770.000,00	0	Tetap
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	25.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000	Efisiensi
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran	100%	100%	123.793.800,00	98.793.800,00	-25.000.000	Pengurangan Anggaran
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	739.500,00	739.500,00	0	Tetap
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.305.000,00	1.305.000,00	0	Tetap
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	11.908.000,00	8.408.000	Kebutuhan pengadaan alat tulis kantor yang belum terakomodasi sebelumnya
23	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.760.300,00	2.760.300,00	0	Tetap
24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	5.489.000,00	5.489.000,00	0	Tetap
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	92.000.000,00	-18.000.000	Efisiensi
26	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100%	100%	85.512.000,00	427.512.000,00	342.000.000	Penambahan Anggaran
27	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	17.888.000,00	19.464.000,00	1.576.000	Penyesuaian kebutuhan dari pengadaan meja rapat menjadi kursi rapat
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	8 Unit	67.624.000,00	399.645.000,00	332.021.000	Pengadaan mobil camat untuk mendukung operasional pelayanan
29	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	223.671.260,00	223.671.260,00	0	Tetap

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.750.000,00	1.750.000,00	0	Tetap
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	52.786.260,00	52.786.260,00	0	Tetap
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	169.135.000,00	169.135.000,00	0	Tetap
33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	137.474.000,00	185.194.000,00	47.720.000	Penambahan Anggaran
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	83.800.000,00	131.520.000,00	47.720.000	Pemeliharaan kendaraan dinas camat dan sekcam
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	19.930.000,00	19.930.000,00	0	Tetap
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	33.744.000,00	33.744.000,00	0	Tetap
37	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana	100%	100 %	42.648.800,00	31.248.800,00	-11.400.000	Pengurangan Anggaran
38	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100 % 87 Indeks	20.302.800,00	8.902.800,00	-11.400.000	Pengurangan Anggaran
39	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	20.302.800,00	8.902.800,00	-11.400.000	Dialihkan ke aktivitas lain
40	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100 % 87 Indeks	22.346.000,00	22.346.000,00	0	Tetap
41	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	22.346.000,00	22.346.000,00	0	Tetap
42	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100%	100 %	60.796.000,00	85.569.000,00	24.773.000	Penambahan Anggaran
43	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100 % 87 Indeks	60.796.000,00	85.569.000,00	24.773.000	Penambahan Anggaran
44	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	7.932.000,00	18.932.000,00	11.000.000	Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi APBDes
45	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	52.864.000,00	66.637.000,00	13.773.000	Untuk mendukung kegiatan PKK di wilayah kecamatan
46	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100%	100 %	24.957.000,00	24.957.000,00	0	Tetap
47	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100 % 87 Indeks	20.196.500,00	20.196.500,00	0	Tetap
48	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	11.535.500,00	11.535.500,00	0	Tetap
49	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	8.661.000,00	8.661.000,00	0	Tetap
50	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100 % 87 Indeks	4.760.500,00	4.760.500,00	0	Tetap
51	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	4.760.500,00	4.760.500,00	0	Tetap
52	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitas urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100%	100 %	153.069.900,00	158.469.900,00	5.400.000	Penambahan Anggaran
53	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	100%	100 % 87 Indeks	153.069.900,00	158.469.900,00	5.400.000	Penambahan Anggaran
54	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	40 Orang	58.064.000,00	58.064.000,00	0	Tetap

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	1 Dokumen	95.005.900,00	100.405.900,00	5.400.000	Untuk pelaksanaan kegiatan MTQ
56	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100%	100 %	27.720.400,00	27.720.400,00	0	Tetap
57	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100 % 87 Indeks	27.720.400,00	27.720.400,00	0	Tetap
58	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.991.000,00	1.991.000,00	0	Tetap
59	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.847.700,00	1.847.700,00	0	Tetap
60	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.308.000,00	2.308.000,00	0	Tetap
61	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	19.800.000,00	19.800.000,00	0	Tetap
62	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.773.700,00	1.773.700,00	0	Tetap

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi dalam tahun berjalan, serta sebagai respon terhadap hasil evaluasi, perubahan kebijakan, dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan”***.

Perubahan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Sungai Pinang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan

pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Martapura, 20 Juni 2025
KAMAT SUNGAI PINANG

MARWATA, SE

Pembina, IV/a

NIP. 19690217 198903 1 003

LAMPIRAN

SK pembentukan tim

Tabel rekapitulasi rumusan rencana perubahan program dan kegiatan (cetak SIPD RI)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN SUNGAI PINANG

Alamat : Belimbing Raya Nomor. 2 Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar Kode Pos 70675
e-mail : kec.sungaipinang.banjar@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT CAMAT SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 33 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI PINANG
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025

CAMAT SUNGAI PINANG
KABUPATEN BANJAR

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran proses penyusunan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah (RENJA) Kab. Banjar Tahun 2025, perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pinang Kab. Banjar Tahun 2025 dengan Keputusan Camat Sungai Pinang.

Mengingat

1. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LNRI Tahun 1953 Nomor 09, TLNRI Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56799);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor

1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Renja Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim penyusun Prubahan Renja Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2024 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang tahun 2025

2. Menyusun perumusan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang
3. Menyusun penetapan perubahan Rencana Kerja Kec. Sungai Pinang Tahun 2025
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 kepada Bappeda Kab. Banjar untuk memperoleh penyempurnaan draft Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SUNGAI PINANG
PADA TANGGAL : 16 JUNI 2025



MARWATA, SE
NIP. 19690217 198903 1 003

Lampiran : Keputusan Camat Sungai Pinang
Kabupaten Banjar
Nomor : 33 Tahun 2025
Tanggal : 16 Juni 2025

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI PINANG
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat	Penanggungjawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Aset	Sekretaris
4	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota



CAMAT SUNGAI PINANG,

MARWATA, SE

NIP. 19690217 198903 1 003

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUNGAI PINANG KAB. BANJAR
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAL OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
KECAMATAN SUNGAI PINANG							2.787.546.288,00	2.887.930.160,00	2.956.428.160,00	168.881.872,00						2.807.265.296,00				
7		UNSUR KEWILAYAHAN					2.787.546.288,00	2.887.930.160,00	2.956.428.160,00	168.881.872,00						2.807.265.296,00				
7.01		KECAMATAN					2.787.546.288,00	2.887.930.160,00	2.956.428.160,00	168.881.872,00						2.807.265.296,00				
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern				100 78,00 78,00 78 % P ersentas e P ersen	78 Indeks	2.478.354.188,00	2.578.738.060,00	2.628.463.060,00	17.121.948,00				2.495.476.136,00				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah : Prediktor SAKIP Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan				100% Persentase	100 % B Predikat	8.207.000,00	8.207.000,00	8.207.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Sungai Pinang	8.218.200,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																1.118.200,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		1.118.200,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG		
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		2.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah : Prediktor SAKIP Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan				100% Persentase	100 % B Predikat	1.861.576.128,00	1.644.960.000,00	1.644.960.000,00	-216.616.128,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Kecamatan Sungai Pinang	1.866.736.128,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	1.811.216.128,00	1.594.600.000,00	1.594.600.000,00	-216.616.128,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.811.216.128,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	49.560.000,00	49.560.000,00	49.560.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		54.720.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		800.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah : Prediktor SAKIP Persentase Laporan Pengelolaan dan Pergantian Aset Barang Milik Daerah				100% Persentase	100 % B Predikat	12.350.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Sungai Pinang	12.350.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		350.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODIC RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penastasisan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu				100% Persentase	100 % B Predikat	25.770.000,00	25.770.000,00	20.770.000,00	-5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Sungai Pinang		25.770.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			770.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Banjar, Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			25.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan				100% Persentase	100 % B Predikat	123.793.800,00	98.793.800,00	114.201.800,00	-9.592.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Sungai Pinang		130.098.800,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	739.500,00	739.500,00	739.500,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			749.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			4.326.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	11.908.000,00	8.408.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.760.300,00	2.760.300,00	2.760.300,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			2.763.300,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	5.489.000,00	5.489.000,00	5.489.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.510.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	85.000.000,00	92.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			113.250.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODIC RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						NASIONAL	DAERAH		
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Persentase Pengadaan Barang Milk Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan				100% Persentase	100 % B Predikat	85.512.000,00	427.512.000,00	419.109.000,00	333.597.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Sungai Pinang		89.734.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	17.888.000,00	17.888.000,00	19.464.000,00	1.578.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		22.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	8 Unit	67.624.000,00	409.624.000,00	399.645.000,00	332.021.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		67.634.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi				100% Persentase	100 % B Predikat	223.671.260,00	223.671.260,00	223.671.260,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Sungai Pinang		224.145.008,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		1.750.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52.786.260,00	52.786.260,00	52.786.260,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		52.795.008,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	169.135.000,00	169.135.000,00	169.135.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		169.600.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Persentase Barang Milk Daerah yang terpelihara				100% Persentase	100 % B Predikat	137.474.000,00	137.474.000,00	185.194.000,00	47.720.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Sungai Pinang		138.424.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	83.800.000,00	83.800.000,00	131.520.000,00	47.720.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		83.800.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	19.930.000,00	19.930.000,00	19.930.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		20.880.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	33.744.000,00	33.744.000,00	33.744.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- - -		33.744.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan				100 100 100% 84,00 Persen Persentas e %	100 %	42.648.800,00	42.648.800,00	31.248.800,00	1.203.200,00							43.852.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODIC RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						NASIONAL	DAERAH		
1	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	IKU Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100% Persentase	100 % 87 Indeks	20.302.800,00	20.302.800,00	8.902.800,00	-11.400.000,00	14	15	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	20.651.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	20.302.800,00	20.302.800,00	8.902.800,00	-11.400.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI LUMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		20.651.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	IKU Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat				100% Persentase	100 % 87 Indeks	22.346.000,00	22.346.000,00	22.346.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	23.201.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan																				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	22.346.000,00	22.346.000,00	22.346.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI LUMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		23.201.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan				100 100% 100 % NA Persen	100 %	60.796.000,00	60.796.000,00	85.569.000,00	92.500,00						60.888.500,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	IKU Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				100% Persentase	100 % 87 Indeks	60.796.000,00	60.796.000,00	85.569.000,00	24.773.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	60.888.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				21 Lembaga K emasyarak atan	21 Lembaga K emasyarak atan	7.932.000,00	7.932.000,00	18.932.000,00	11.000.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI LUMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		7.933.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	52.864.000,00	52.864.000,00	66.637.000,00	13.773.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI LUMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		52.955.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan				100 100% 100 % NA Persen	100 %	24.957.000,00	24.957.000,00	24.957.000,00	75.460,00						25.032.460,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	IKU Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100% Persentase	100 % 87 Indeks	20.196.500,00	20.196.500,00	20.196.500,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN dan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	20.259.460,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	11.535.500,00	11.535.500,00	11.535.500,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI LUMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -		11.995.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	8.661.000,00	8.661.000,00	8.661.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI LUMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		8.663.960,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	IKU Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				100 % 87 Indeks		4.760.500,00	4.760.500,00	4.760.500,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN dan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	4.773.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODIC RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB									
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						NASIONAL	DAERAH							
1			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penguatan Peraturan-Undang-undang dan/atau Kepolisan Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	4.760.500,00	4.760.500,00	4.760.500,00		13	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	17	18	19	20	4.773.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum yang dilaksanakan				0 100 100% % NA	100 %	153.069.900,00	153.069.900,00	158.469.900,00		1.064.600,00											154.134.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	IKU Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100% Persentase	100 % 87 Indeks	153.069.900,00	153.069.900,00	158.469.900,00		5.400.000,00					Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang				154.134.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40 Orang	40 Orang	58.064.000,00	58.064.000,00	58.064.000,00		0,00		Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan						59.128.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																							
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	95.005.900,00	95.005.900,00	100.405.900,00		5.400.000,00		Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan						95.006.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik				100 100% % NA	100 %	27.720.400,00	27.720.400,00	27.720.400,00		161.300,00											27.881.700,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	IKU Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100% Persentase	100 % 87 Indeks	27.720.400,00	27.720.400,00	27.720.400,00		0,00					Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang				27.881.700,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																							
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00		0,00		Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan						1.998.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa																							
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.847.700,00	1.847.700,00	1.847.700,00		0,00		Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan						1.848.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																							
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.308.000,00	2.308.000,00	2.308.000,00		0,00		Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan						2.335.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																							
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00		0,00		Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-						19.810.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																							
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.773.700,00	1.773.700,00	1.773.700,00		0,00		Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan						1.890.700,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
J U M L A H																								2.807.265.296,00	